

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu negara OECD, Korea Selatan dikategorikan sebagai negara maju ditunjukkan dengan berkembang pesatnya sektor ekonomi dan teknologi. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan kesetaraan gender yang terjadi di Korea Selatan yang sudah menjadi masalah sejak lama dikarenakan oleh konfusianisme, seiring berjalanya waktu kesetaraan gender yang seharusnya semakin membaik justru masih menjadi masalah yang cukup serius di Korea Selatan, khususnya di era kepemimpinan Yoon Suk Yeol yaitu tahun 2022-2024. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kebijakan yang diambil selama pemerintahan Yoon dalam sektor politik, ekonomi dan pendidikan menunjukan bahwa Korea Selatan sebagai negara yang sudah meratifikasi CEDAW tidak sepenuhnya menaati indikator CEDAW itu sendiri, ditunjukkan dengan Korea Selatan yang tidak berkomitmen dengan dihapuskannya Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (MOGEF) menunjukan bahwa pemerintah tidak aktif dalam mendukung institusi terkait kesetaraan gender di Korea Selatan, pada ranah politik Yoon menunjukan tindakan yang pasif dengan tidak membuat kebijakan baru yang mendukung perempuan di ranah politik, dalam indikator protect, beberapa kebijakan sebelumnya dipertahankan oleh Yoon namun tidak ada yang bisa menyentuh akar masalah struktural, dilihat dari ketidak merataannya perlindungan terhadap perempuan sehingga dianggap tidak optimal. lalu pada point prevent, pada kepemimpinan Yoon belum ada kebijakan yang bersifat edukatif seperti pendidikan gender, justru Yoon mengganti kurikulum dalam pendidikan menjadi lebih sempit.

Ketimpangan dari ketiga indikator tersebut berakar pada institusi politik yang dikaji melalui Feminisme Institusional dimana sebuah institusi memiliki peran penting dalam memperbaiki atau memperburuk ketidaksetaraan gender di suatu negara. Dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa institusi dibawah kepemimpinan Yoon Suk Yeol yaitu sebagai institusi formal terlihat menunjukkan kemunduran dari berbagai kebijakan yang sudah di terapkan pada Korea Selatan, sehingga institusi informal yaitu norma Korea Selatan terkait patriarki makin meningkat. Lalu, pada indikator kedua yaitu terkait perubahan dan keberlanjutan institusi, pemerintahan Yoon lebih memilih untuk mempertahankan status quo dan citra anti feminisme yang sudah ia berikan ke masyarakat sejak masa kampanye. Meskipun terdapat beberapa kebijakan lama dari presiden sebelumnya yang ia masih terapkan, hal tersebut tidak memberikan perbedaan signifikan karena kebijakan baru yang ia buat terkait kesetaraan gender cukup ekstrim. Pada poin ketiga, masyarakat korea yang masuk kedalam indikator agensi banyak melakukan upaya untuk menyuarakan kesetaraan gender melalui aksi seperti demo, konferensi pers dan lainnya. Meskipun aksi tersebut tidak dihalangi dan beberapa rekomendasi masyarakat di dengar oleh pemerintah, perubahan terkait kebijakan pada masa Yoon Suk Yeol sulit diubah oleh masyarakat. Pada poin terakhir, sekaligus menyimpulkan bagaimana institusi Yoon Suk Yeol terkait kebijakan kesetaraan gender yang menunjukkan bahwa kegagalan Korea Selatan dalam memenuhi kewajibannya sebagai *state duties* pada CEDAW bukan hanya disebabkan oleh kurangnya komitmen secara administratif atau formal diatas kertas, melainkan jauh lebih rumit daripada itu dimana kegagalan ini bersifat struktural yang sudah mengakar kuat pada institusi Korea Selatan, dilihat dari kebijakan resmi maupun nilai nilai informal yang sudah terpengaruhi oleh budaya patriarki. Pemerintahan Korea Selatan pada masa kepemimpinan Yoon Suk Yeol sebagai bukti bagaimana sebuah

institusi negara dapat bertahan dalam struktur yang maskulin meskipun setelah ditekan oleh beberapa aktor seperti masyarakat bahkan PBB. Meskipun beberapa kebijakan telah direvisi, pemerintahan Yoon tetap konservatif. Dengan demikian, kebijakan kesetaraan gender Korea Selatan pada masa kepemimpinan Yoon Suk Yeol mengalami kemunduran, dengan dilihat dari tolak ukur CEDAW sebagai sebuah perjanjian internasional yang formal dan simbolik serta dilihat dari bagaimana kebijakan yang diterapkan pada masa Yoon Suk Yeol yang tidak menunjukkan keseriusan dan cenderung abai dalam mendukung kesetaraan gender di Korea Selatan. Sehingga yang terjadi adalah kebijakan kesetaraan gender pada masa kepemimpinan Yoon Suk Yeol mengalami stagnasi dan kasus kesetaraan gender di Korea Selatan akan semakin meningkat.

4.2 Saran

Kesetaraan gender adalah hak seluruh orang juga merupakan kewajiban bagi negara yang sudah meratifikasi CEDAW dengan tujuan mendukung serta menjaga kesetaraan gender di suatu negara. Korea Selatan sebagai state duties seharusnya dapat menjamin kesetaraan gender di dapat dirasakan oleh masyarakat dalam aspek kehidupan sehari-hari, baik itu pada sektor pendidikan, ekonomi maupun politik. Negara seharusnya merupakan aktor yang paling aktif dalam mencegah dan mengurangi kesetaraan gender. Oleh karena itu, Korea Selatan perlu meningkatkan komitmennya dalam mempertanggungjawabkan keanggotaannya pada CEDAW secara menyeluruh tidak hanya secara administratif saja, khususnya pada point promote, protect dan prevent. Keberhasilan maupun kegagalan Korea Selatan tentunya dipengaruhi oleh bagaimana institusi didalamnya, pemerintah Korea Selatan dalam politik, ekonomi dan pendidikan serta mengambil kebijakan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.

Pemerintah Korea Selatan sebagai negara demokrasi seharusnya perlu untuk membuka ruang dialog langsung terhadap kelompok masyarakat maupun organisasi perempuan sehingga terjalin hubungan dua arah yang nantinya akan lebih mudah untuk mengetahui kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan pun akan sebanding dengan kebutuhan masyarakat dan dengan hal tersebut akan mengurangi aksi demonstrasi yang sering dilakukan masyarakat Korea Selatan terhadap kebijakan Yoon Suk Yeol.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam ruang lingkup ataupun pendekatan yang peneliti gunakan. Sehingga, penulis menyarankan agar penelitian bisa dilanjutkan terutama membahas secara lebih mendalam mengenai kebijakan terkait kesetaraan gender di Korea Selatan pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol ataupun kepemimpinan selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan komparatif yang berbeda atau fokus kebijakan yang lebih spesifik dan berdampak langsung terhadap masyarakat Korea Selatan khususnya perempuan. Sehingga, diharapkan akan muncul terkait pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana langkah kebijakan kesetaraan gender di Korea Selatan dibuat dan diterapkan.